

**PENERAPAN *TAX AMNESTY* DITINJAU DARI EFISIENSI
PENGELUARAN KAS WAJIB PAJAK ANTARA MELAKUKAN *TAX
AMNESTY* DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Strata 1 pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

ANNISA NUR VITRIANI

B 200 140 350

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

“PENERAPAN TAX AMNESTY DITINJAU DARI EFISIENSI PENGELUARAN KAS WAJIB PAJAK ANTARA MELAKUKAN TAX AMNESTY DENGAN SPT (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan)”

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

Annisa Nur vitriani

B200140350

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dra. Mujiyati, M.Si.

NIDN.0610056606

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN TAX AMNESTY DITINJAU DARI EFISIENSI PENGELUARAN KAS WAJIB PAJAK ANTARA MELAKUKAN TAX AMNESTY DENGAN PEMBETULAN SPT.

(Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan)

Yang ditulis oleh:

ANNISA NUR VITRIANI
B 200 140 350

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
pada hari Kamis, 5 April 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji:

1. Dra.Mujiyati, M.Si.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Fauzan, S.E., M.Si., Akt.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs.Yuli Tri Cahyono, M.M., Akt.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(**Dr. Syamsudin, S.E., M.M.**)
NIDN. 0017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 5 April 2018

Penulis,



ANNISA NUR VITRIANI)D

B 200 140 350

**PENERAPAN TAX AMNESTY DITINJAU DARI EFISIENSI
PENGELUARAN KAS WAJIB PAJAK ANTARA MELAKUKAN TAX
AMNESTY DENGAN PEMBETULAN SPT
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak
Badan)**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menguji penerapan *tax amnesty* ditinjau dari efisiensi pengeluaran kas Wajib Pajak antara melakukan *tax amnesty* atau pembetulan SPT. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah satu Wajib Pajak Orang Pribadi dan satu Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat dan sudah melakukan *tax amnesty*. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi akan lebih efisien dalam pengeluaran kasnya apabila melakukan *tax amnesty*, baik di periode I, II, maupun periode III dari pada melakukan pembetulan SPT. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan pengeluaran kasnya akan lebih efisien jika melakukan *tax amnesty* pada periode I. Apabila Wajib Pajak tidak melakukan *tax amnesty* maupun pembetulan SPT, maka akan dikenai sanksi sebesar 200%. Kata kunci: Pajak, Efisiensi, *Tax Amnesty*, dan Pembetulan SPT

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the application of tax amnesty obtained from net income of taxpayer between tax amnesty or Rectification Notice (SPT) correction. The object of research in this research is one individual taxpayer and one taxpayer in the Tax Office Primary and has done tax amnesty. The method used is descriptive method. Result of research indicate that Individual Taxpayer will be more efficient in issuing taxes, either at period I, II, and period III than to make SPT correction. While for Taxpayer will be more efficient if doing tax amnesty in period I. If Taxpayer does not do tax amnesty or SPT correction, it will be subject to sanction of 200%.

Keywords: Tax, Efficiency, Tax Amnesty, and SPT Refinement

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi terbesar pemasukan negara yang digunakan untuk pembangunan negara. Meskipun pendapatan negara dari sektor pajak paling tinggi dibandingkan dengan sumber lain tetapi *tax ratio* di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurut Simanjuntak dan Mukhlis 2012 (dalam Sari, V.A.P, 2017:2) *tax ratio* adalah salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur

keberhasilan dalam penerimaan negara dari pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani (dalam Sari, V.A.P, 2017:2) mengatakan saat ini Indonesia berada di posisis 16 ekonomi terbesar di dunia, namun tingkat rasio pajak (*tax ratio*) di Indonesia masih sama dengan negara-negara di kawasan Afrika. Penerimaan pajak yang masih rendah jika dibandingkan dengan PDB menunjukkan bahwa masih terdapat potensi pajak yang bisa digali oleh pemerintah dari masyarakat. Dalam mencapai target pajak yang ditetapkan dalam APBN ada berbagai kendala yang dapat menghambat pengumpulan pajak. Salah satu kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibanya.

Pajak adalah iuran dari rakyat yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang harus dibayar oleh rakyat, tidak dapat mengelak dan harus dilakukan oleh rakyat untuk membayarnya sebagai konsekuensi berlakunya UU. Apabila rakyat selaku wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tersebut maka akan dikenakan sanksi oleh pemerintah berdasarkan UU atau dengan kata lain wajib pajak tersebut dapat dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan menggunakan surat paksa dan atau sita (Mujiyati dan Abdul Aris. 2014.)

Kewajiban wajib pajak meliputi kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, kewajiban pelaporan dan kewajiban pencatatan atau pembukuan. Kewajiban mendaftarkan diri sesuai dengan sistem *self assessment*, maka WP wajib untuk mendaftarka diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan WP untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah itu Wajib Pajak UMKM (orang pribadi atau badan) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang sesuai dengan ketentuan pemotongan atau pemungutan pajak. Pajak yang telah dibayar tersebut wajib dilaporkan.

Dalam melaksanakan pembayaran pajak dengan sistem *self assesment* Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran sendiri mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang. Pembayaran pajak manual yang selama ini dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Mulai tanggal 1 Januari 2016 pembayaran pajak dilakukan secara online melalui *E-Billing*. Untuk mengakomodasi peralihan cara pembayaran pajak dari sistem manual ke sistem online melalui *E-Billing*, maka Bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara serta PT Pos Indonesia masih terus melayani pembayaran pajak secara manual hanya sampai tanggal 30 Juni 2016. Untuk dapat menggunakan sistem E-Billing ini WP harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu di alamat <http://sse.pajak.go.id> dengan memasukkan nomor NPWP dan alamat email dan selanjutnya WP dapat mengisi data setoran pajak melalui alamat tersebut.

Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri oleh WP, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ditunjuk berdasarkan ketentuan pajak untuk memotong/memungut pajak dan menyetorkannya ke kas negara. Jenis-jenis pemotongan/pemungutan pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Kewajiban WP selanjutnya adalah melaporkan pajak yang dibayar atau dipotong/dipungut dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP atau K4 tempat WP terdaftar. Surat Pemberitahuan (SPT) juga berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban perhitungan pajak yang telah ditentukan, melaporkan harta dan kewajiban yang telah ditentukan. Menurut UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang tatacara perpajakan pasal 3 telah dijelaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dan menandatangani serta melaporkan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal

Pajak. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk wajib pajak badan.

Selanjutnya menurut UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang KUP pasal 13A wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan berupa 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Apabila wajib pajak merasa tidak benar dalam pengisian Surat Pemberitahuan, wajib pajak diberi keringanan untuk membetulkan pengisian SPT yang diatur dalam UU No 28 pasal 8 Tahun 2007 tentang KUP, bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Apabila wajib pajak telah melakukan kesalahan perhitungan PPh atau pelaporan SPT terdapat kekurangan PPh yang dibayar ditambah sanksi akan memberatkan beban wajib pajak apalagi bila dilakukan secara beruntun. Selanjutnya akan memicu wajib pajak untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak karena beban terasa berat, oleh karena itu pemerintah menertbitkan UU No 11 tahun 2016 tentang pengampunan Pajak (*Tax*

Amnesty). Menurut Peraturan Menteri Keuangan no 118 pasal 1 ayat 2 tahun 2016 tentang pelaksanaan *tax amnesty*, *Tax amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dan tidak dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Dengan melakukan Tax Amnesty wajib pajak memperoleh keuntungan antara lain: (1) Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, (2) Tidak dikenai sanksi administrasi pajak berupa bunga atau denda untuk suatu kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan Tahun Pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPN dan PPN atau PPnBM, (3) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan Tahun Pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPN dan PPN atau PPnBM, (4) Penghentian suatu pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan Tahun Pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPN dan PPN atau PPnBM. (www.gurupendidikango.id).

Sedangkan bagi pemerintah Pengampunan pajak bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang tertuang pada UU No 11 Tahun 2016 pasal 2.

Dengan diberlakukannya *Tax Amnesty*, pemerintah menginginkan kekayaan warga Indonesia di luar negeri ditarik ke tanah air (Repatriasi). Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, penerimaan Uang Tebusan diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna bagi negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, negara akan mendapatkan perimaan dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 118 Tahun 2016 pasal 44, WP yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak berakhir, Direktur Jenderal Pajak menemukan data atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan / atau informasi mengenai harta tersebut. Data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak, ditemukan paling lama dalam jangka 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku. Atas tambahan penghasilan, dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar.

Tax amnesty merupakan sebuah pilihan. Wajib Pajak boleh memilih antara mengikuti program tax amnesty atau membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan memilih untuk membetulkan Surat Pemberitahuan dengan konsekuensi Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa

bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penelitian tentang penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia telah dilakukan oleh Ragimun dengan judul “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia dengan hasil *Tax amnesty* dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan *tax amnesty*. dan oleh Jamil, Nur Aisyah (2017) tentang “Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia”, dengan hasil penerapan *tax amnesty* hingga periode kedua belum berjalan efektif dan perlu dilakukan perbaikan di periode selanjutnya. Namun kedua penelitian tersebut ditinjau dari sisi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Salidri, Feri dan Mujiyati (2017) dengan judul “Efisiensi Aplikasi *Tax Amnesty* Sebuah Pilihan” dengan hasil Wajib Pajak yang memilih melakukan *Tax Amnesty* lebih efektif dibandingkan dengan melakukan Pembetulan SPT karena *Tax Amnesty* lebih sederhana dalam tarif dan perhitungannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan simulasi ulang untuk membuktikan dan menguji kembali “Penerapan *Tax Amnesty* Ditinjau Dari Efisiensi Pengeluaran Kas Wajib Pajak Antara Melakukan *Tax Amnesty* Dengan Pembetulan Spt.”

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang dijelaskan baik menggunakan angka maupun kata-kata (Punaji, 2010), Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi analisis dokumenter tujuannya mengungkapkan informasi-informasi yang ada dalam bidang kajian tertentu. Secara lebih khusus analisis dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah efisiensi antara *Tax Amnesty* dan pembetulan Surat Pemberitahuan.

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku,, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Langkah pengumpulan data diperoleh dengan meminta dokumen pada subyek penelitian, kemudian di analisis untuk menentukan hasil penelitian.

Data yang diperlukan sebagai berikut: informasi identitas tentang Wajib Pajak orang pribadi dan badan,serta bukti, catatan, dan dokumen yang dimiliki Wajib Pajak orang pribadi dan badan terkait dengan *Tax Amnesty* maupun pembetulan SPT.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Dalam penelitian ini Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki Harta yang telah dilaporkan dalam SPT Terakhir tahun 2015 sebesar Rp 486.000.000,00 dan Harta yang belum dilaporkan dalam SPT terakhir adalah sebesar Rp 335.000.000,00. Nilai Harta bersih yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT terakhir akan menjadi dasar pengenaan Uang Tebusan (PMK No 118 Pasal 8), maka Uang Tebusan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak pada gelombang I sebesar 2% dikalikan dengan Nilai Harta Bersih sebesar Rp 335.000.000,00. Sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi membayar senilai Rp 6.700.000,00.

Sedangkan tarif Uang Tebusan pada gelombang II sebesar 4% di kalikan dengan Nilai Harta Bersih sebesar Rp 335.000.000,00, maka Uang Tebusan yang harus dibayar senilai Rp 10.050.000,00. Selanjutnya untuk tarif Uang Tebusan pada gelombang III sebesar 5% di kalikan dengan Nilai Harta Bersih sebesar Rp 335.000.000,00 maka Uang Tebusan yang harus dibayar adalah senilai Rp 16.750.000,00. Uang Tebusan harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi.

Wajib pajak yang sudah memutuskan mengikuti program *tax amnesty* tidak diperkenankan untuk melakukan pembetulan SPT. Wajib pajak yang melakukan program *tax amnesty* hanya perlu membayar uang tebusan saja dan

tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan berupa bunga ataupun denda maupun sanksi pidana. Keuntungan lain dari program *tax amnesty* adalah Wajib Pajak tidak dilakukan pemeriksaan pajak dan penghentian pemeriksaan pajak serta penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan (PMK No 118 pasal 23).

Dalam Penelitian ini Wajib Pajak Badan memiliki Nilai Harta Bersih yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp 17.234.467.785,00 dan memiliki Nilai Harta Bersih dalam negeri yang belum dilaporkan dalam SPT senilai Rp 535.000.000,00 Nilai Harta bersih yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT terakhir akan menjadi dasar pengenaan Uang Tebusan (PMK No 118 Pasal 8), maka Uang Tebusan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak adalah senilai:

Gelombang I : $4\% \times \text{Rp } 535.000.000,00 = \text{Rp } 21.400.000,00$

Gelombang II : $6\% \times \text{Rp } 535.000.000,00 = \text{Rp } 32.100.000,00$

Gelombang III : $10\% \times \text{Rp } 535.000.000,00 = \text{Rp } 53.500.000,00$

Wajib Pajak Badan setelah melakukan Amnesty Pajak berhak mendapatkan fasilitas Pengampunan Pajak sama seperti halnya Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib pajak hanya perlu membayar uang tebusan, dan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Apabila Wajib Pajak Badan, melakukan Amnesty Pajak dengan benar, berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2016 pasal 18 yaitu jika mengikuti *Tax Amnesty* namun kemudian hari ternyata ditemukan harta yang tidak diungkapkan/ dilaporkan di dalam periode *Tax Amnesty* yaitu harta per 31 Desember 2015, maka atas temuan harta tersebut akan dikenai tarif pajak sebesar tarif PPh pribadi yang berlaku (25% untuk Wajib Pajak Badan), dan di tambah sanksi denda 200%.

Menurut Undang-Undang *Tax Amnesty* No 11 Tahun 2016 Pasal 13, Wajib Pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty* harus menyampaikan laporan berkala kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri atas harta repatriasi dan deklarasi dalam negeri. Karena dalam penelitian ini Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan tidak memiliki harta yang

direpatriasi, maka kedua Wajib pajak hanya menyampaikan laporan atas deklarasi harta dalam negeri.

Wajib Pajak setelah melakukan *Amnesty* Pajak atas Harta Deklarasi Dalam Negeri tidak dibolehkan mengalihkan atau menginvestasikan Harta keluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menyusun Laporan Penempatan Harta Tambahan yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) minimal 3 (tiga) tahun sejak terbitnya Surat Keterangan Pengampunan Pajak dan harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta tambahan keluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (PMK/118/2016/pasal 13).

Laporan pengalihan dan realisasi harta tambahan disampaikan secara berkala setiap semester 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun sejak pengalihan harta dan disampaikan paling lambat tanggal 20 (duapuluh) bulan berikutnya setelah periode berakhir (PMK No 118 Tahun 2016 pasal 38). Beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh Wajib Pajak jika akan menyampaikan penyusunan laporan paska *tax amnesty*, antara lain: (1) Surat Keterangan Pengampunan Pajak, (2) Formulir Laporan Penempatan Harta Dalam Negeri dan/atau Formulir Laporan Penempatan Harta Repatriasi, (3) Softcopy validasi pelaporan Harta dalam negeri dan/atau validasi pelaporan harta repatriasi, (4) CD/DVD untuk burning ke softcopy .xls validasi pelaporan harta untuk dilaporkan ke kantor pajak.

Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat Peringatan bila Wajib Pajak tidak menjalankan kewajiban setelah *Amnesty* Pajak. Dalam kurun waktu maksimal 14 (empatbelas) hari sejak tanggal pengiriman Surat Peringatan dari KPP Wajib Pajak harus menyampaikan tanggapan surat peringatan atau laporan berkala. Selanjutnya apabila Wajib Pajak ada tanggapan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak menyampaikan tanggapan atas Surat Peringatan dan tidak menyampaikan laporan berkala setelah peringatan, maka Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan (PER-03/PJ/2017).

Penyampaian laporan dapat dilakukan secara langsung ke KPP tempat terdaftar atau KP2KP yang ditunjuk oleh KPP, melalui kantor pos, perusahaan

jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan amplop tertutup dengan bukti pengiriman surat, atau secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan apabila (a) informasi harta tambahan yang dilaporkan tidak sesuai dengan ketentuan, (b) tidak menyampaikan laporan harta tambahan sampai batas waktu laporan, atau (c) terdapat ketidaksesuaian ketidaklengkapan atas laporan yang disampaikan WP melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dan saluran tertentu (Revisi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 tentang Laporan Penempatan Harta *Amnesty* Pajak dalam siaran pers Direktorat Jendral Pajak www.pajak.go.id).

3.2 Pembahasan

Uang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak

Wajib Pajak	Tax Amnesty	Pembetulan SPT
Orang Pribadi	Periode I: $(2\% \times \text{Rp}335.000.000,00)$ $= \text{Rp}6.700.000,00$ Periode II: $(3\% \times \text{Rp}335.000.000,00)$ $= \text{Rp} 10.050.000,00$ Periode III $(6\% \times \text{Rp}335.000.000,00)$ $= \text{Rp} 16.750.000,00$	$(\text{Penghasilan 2} - \text{Penghasilan 1}) \times \text{Rp} 223.250.000,00 - \text{Rp} 16.000.000,00$ $= \text{Rp} 207.250.000,00.$
Badan	Periode I $(4\% \times \text{Rp} 535.000.000)$ $= \text{Rp} 21.400.000,00$ Periode II $(6\% \times \text{Rp} 535.000.000)$ $= \text{Rp} 32.100.000,00$ Periode III $(10\% \times \text{Rp}535.000.000,00)$ $= \text{Rp} 53.500.000,00$	$(\text{Penghasilan 2} - \text{Penghasilan 1}) \times \text{Rp} 133.750.000,00 - \text{Rp} 112.500.000,00 = \text{Rp} 21.500.000,00$

Sanksi yang diterima Wajib Pajak:

Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Jika pembetulan SPT Tahunan yang

dilakukan mengakibatkan adanya penambahan utang pajak, maka Wajib Pajak Orang Pribadi dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan (maksimal atas jumlah pajak yang kurang di bayar).

Sanksi Administrasi atas pajak yang kurang bayar:

$$2\% \times \text{Rp } 207.250.000,00 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp } 99.480.000,00$$

Apabila Wajib Pajak tidak melakukan Tax Amnesty maupun pembetulan SPT akan dikenai sanksi administrasi:

$$200\% \times \text{pajak penghasilan atas harta tambahan}$$

$$200\% \times \text{Rp } 223.250.000,00 = \text{Rp } 446.500.000,00$$

Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Jika pembetulan SPT Tahunan yang dilakukan mengakibatkan adanya penambahan utang pajak, maka Wajib Pajak Orang Pribadi dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan (maksimal atas jumlah pajak yang kurang di bayar).

Sanksi Administrasi atas pajak yang kurang bayar sebesar:

$$2\% \times \text{Rp } 21.500.000,00 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp } 10.320.000,00$$

Apabila Wajib Pajak tidak melakukan Tax Amnesty atau Pembetulan SPT akan dikenai sanksi administrasi sebesar:

$$200\% \times \text{harta tambahan atas harta tambahan}$$

$$200\% \times \text{Rp } 133.750.000,00 = \text{Rp } 267.500.000,00$$

Bagi Wajib Pajak yang melakukan *Tax Amnesty*, memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi dan tidak dikenai sanksi pidana; penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda; tidak dilakukan pemeriksaan pajak; dan penghentian pemeriksaan pajak serta penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut PMK No 118 Tahun 2016 pasal 23.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian tentang Penerapan *Tax Amnesty* Ditinjau Dari Efisiensi Pengeluaran Kas Wajib Pajak Antara Melakukan *Tax Amnesty* atau Membetulan SPT dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Apabila Wajib Pajak memilih melakukan *Tax Amnesty*, maka Wajib Pajak hanya perlu mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan Harta, tetapi jika memilih melakukan pembetulan SPT maka Wajib Pajak perlu mempetulkan atau membenarkan SPT yang sebelumnya, *Tax amnesty* lebih sederhana dalam perhitungannya, karena apabila Wajib Pajak memilih melakukan *Tax Amnesty*, maka Wajib Pajak hanya perlu membayar uang tebusan atas harta yang kurang atau belum dilaporkan dalam SPT terakhir dan tidak dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana perpajakan, Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pengeluaran kas akan lebih efisien jika Wajib Pajak melakukan *tax amnesty*, baik periode pertama, kedua maupun periode ketiga karena kas yang dikeluarkan lebih kecil, Untuk Wajib Pajak Badan pengeluaran kas akan lebih efisien jika Wajib Pajak melakukan *tax amnesty* di periode pertama karena tarif yang masih rendah jika dibandingkan dengan periode kedua dan periode ketiga, Bagi Wajib Pajak yang melakukan *Tax Amnesty* akan mendapatkan jaminan tidak dilakukannya pemeriksaan pajak jika Wajib Pajak melakukan *Tax Amnesty* dengan benar, jujur, dan transparan, serta melakukan kewajiban pelaporan setelah periode *tax amnesty* berakhir.

4.2 Saran

Adanya keterbatasan dan kekurangan dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jurnal-jurnal yang mendukung mengenai penelitian ini, Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah tahapan atau program maupun prosedur lain yang harus dilakukan setelah diberlakukan *Tax Amnesty*.

DAFTAR PUSTAKA

- Mujiyati dan Abdul Aris. 2014. "Perpajakan Kontemporer". Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mujiyati dan Abdul Aris. 2017. "Inti Perpajakan Indonesia". Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ragimun. 2017. "Analisis Implementasi Tax Amnesty di Indonesia." Diakses dari [http:// www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).
- Salindri, Feri. 2017." Efisiensi Aplikasi *Tax Amnesty* Sebuah Pilihan". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses dari <http://eprints.ums.ac.id>.
- Sari, V.A.P. 2017. "Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 6, Nomor 2, Februari 2017.
- Sucahyowati, Hari. 2017. "Manajemen Sebuah Pengantar." Diakses dari <https://books.google.co.id>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Perhitungan Penghasilan Netto.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 118 Tahun 2016 Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.